1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Inflasi Kabupaten Berau Maret 2026 tercatat sebesar 2,38% (y-on-y)dengan IHK 110,95 angka terendah di Kalimantan Timur tren inflasi bulanan menunjukkan peningkatan sebesar 0,76% (m-to-m) terutama dipicu oleh kelompok makanan,minuman,dan tembakau yang perlu diwaspadai menjelang Ramadhan Idul Adha. Berikut rincian data perkembangan inflasi Kabupaten Berau tahun 2026 :

   - Maret 2026
     - Inflasi Year on Year (y-on-y) : 2,38%
     - Inflasi Month to Month (m-to-m) : 0,76%
     - Inflasi Year to Date (y-to-d) : 0,60%
     - Kondisi ini sebagai Inflasi terendah di Kalimantan Timur.
   - Februari 2026
   - Inflasi Year on Year (y-on-y) : 4,15%
   - Inflasi Month to Month (m-to-m) : 0,15%
   - Inflasi Year to Date (y-to-d) : 0,16%
   - Januari 2026
   - Inflasi Year on Year (y-on-y) : 3,78%
   - Deflasi Month to Month (m-to-m) : 0,32%
   - Deflasi Year to Date (y-to-d) : 0,32%

   Faktor pendorong inflasi (maret 2026 : kenaikan inflasi tahunan di dorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang naik 3,14%.Pemerintah Kabupaten Berau tetap waspada terhadap kenaikan harga pangan, meskipun inflasi daerah berhasil dikendalikan menjadi yang terendah di Kalimantan Timur pada bulan maret 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi didaerah.

   Permasalahan utama pengendalian inflasi di daerah meliputi :

   - Rendahnya konektifitas distribusi
   - Kesenjangan informasi pasar
   - Dan distorsi struktur pasar

   Faktor lain mencangkup :

   - Gangguan cuaca pada produksi
   - Fluktuasi harga komoditas pangan (cabai/ayam)
   - Serta penurunan harga beli masyarakat

   Hal ini di perparah dengan tingginya biaya logistic antar wilayah.

   Berikut identifikasi permasalahan pengendalian inflasi didaerah :

   - Distribusi dan logistic

Kurangnnya infrastruktur dan konektivitas transportasi menyebabkan keterlambatan pasokan barang memicu kenaikan harga.

- Komoditas seperti cabai merah, daging ayam, dan bawang sering mengalami lonjakan harga akibat gangguan produksi dan cuaca.
- Rantai distribusi yang terlalu Panjang dan ketidak seimbangan informasi harga antar wilayah menyulitkan stabilisasi harga.
- Ketergantungan pasokan dari luar daerah dan terbatasnya perluasan area tanam membuat rentan terhadap inflasi.
- Penurunan daya beli masyarakat dan kenaikan harga komoditas global atau nasional (harga emas, tiket pesawat)juga menekan inflasi local.
- Kebutuhan akan intervensi pasar yang lebih terukur, monitoring harga yang intensif serta kerjasama Antar Daerah (KAD) belum optimal.

Langkah konkrit yang disarankan adalah memperkuat Kerja sama antar Daerah (KAD), meningkatkan efisiensi distribusi serta optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan inflasi didaerah

Berfokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah utama meliputi :

- Pemantauan harga intensif
- Intervensi pasar (operasi pasar)
- Menjaga kelancaran distribusi
- Kerjasama Antar Daerah dan
- Koordinasi dengan pusat (rapat mingguan) untuk memastikan pasokan.

Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan inflasi Daerah :

- Rapat rutin, dipimpin pemerintah pusat secara virtual dilakukan setiap hari senin untuk memantau harga terkini
- 6 langkah konkrit (TPID) : meliputi penguatan data ketersediaan bahan pokok, monitoring harga, distribusi pangan,intervensi pasar terukur, pengendalian transportasi logistic, dan Kerjasama Antar Daerah.
- Pemerintah Daerah menggerakkan Bulog contonya : menyalurkan Beras SPHP dan Minyak Kita untuk menstabilkan harga.
- Penyampaian informasi untuk menghindari kepanikan pembelian oleh masyarakat.

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung Kepala Daerah dalam melakukan koordinasi serta inovasi dalam pengendalian harga di lapangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau di fokuskan pada sinergi TPID melalui strategis 4K : Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komonikasi Efektif.

Langkah strategis meliputi gerakan pangan murah, penguatan data stok serta sidak pasar untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Langkah – langkah strategis pengendalian inflasi Kabupaten Berau :

- Pemerintah Kabupaten Berau rutin menggelar pangan murah untuk menekan harga kebutuhan pokok seperti : beras dan minyak goreng
- High Level Meeting (HLM) : Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Dinas Pangan dan Stakeholder terkait melakukan HLM untuk mengevaluasi komoditas penyumbang inflasi, terutama bahan makanan dan hasil laut.
- Monitoring harga di pasar : Pemantauan intensif dilakukan secara konsisten ke pasar-pasar untuk memantau pergerakan harga komoditas utama (ikan laying, emas perhiasan, daging ayam)
- Pengendalian Distribusi : menjaga kelancaran logistic bahan pokok yang masuk Kabupaten Berau untuk menghindari kelangkaan.
- Edukasi dan Konsumsi Bijak : memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM mengenai konsumsi untuk menjaga daya beli.

Kebijakan ini terbukti efektif menjaga inflasi di Berau dengan mencatat tingkat inflasi yang relatif stabil atau terendah di Kalimantan Timur pada periode tertentu (Maret 2026 2,38%).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah yang efektif meliputi 6 langkah konkret antara lain :

- Pemantauan harga intensif
- Operasi pasar
- Kerjasama Antar Daerah (KAD)
- Penguatan ketahanan pangan
- Subsidi transportasi dan
- Komonikasi public

Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan data akurat sangat krusial untuk intervensi pasar.

Rekpmendasi kebijakan utama :

- Optimalisasi 6 langkah konkret (Kemendagri)
  - Monitoring Harga dan Stok :

Pemantauan harian harga komoditas utama (bahan pokok) di pasar tradisional dan ritel modern.

- Operasi Pasar dan Pasar Murah :

Intervensi pasar secara terukur untuk menstabilkan harga saat terjadi lonjakan.

- Kerjasama Antar Daerah (KAD) :

Mengatasi kelangkaan suplai dengan mendatangkan komoditas dari daerah surplus.

- Peningkatan Ketahanan Pangan :

Mendorong budidaya mandiri (misal : urban farming) untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar .

- Subsidi Transportasi / Logistik :

Menggunakan APBD untuk mensubsidi biaya angkut pangan guna menekan harga di tingkat konsumen.

- Komonikasi Publik :

Menghindari kepanikan masyarakat dengan transparansi informasi harga dan stok.

- Strategi Penguatan :
- Digitalisasi Data : menggunakan data berbasis teknologi untuk memantau pergerakan harga secara real-time.
- Pemanfaatan Insentif Fiskal : menggunakan dana insentif dari penerimaan pusat untuk daerah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi.
- Optimalisasi APBD : mengarahkan belanja daerahuntuk penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur distribusi.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga ditingkat lokal agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.